



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 114

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

inspe[✓]torat



BANDUNG
LEBIH BEDAS!



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2025**

inspe[✓]torat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah selesai disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Perubahan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dan berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, maka disusunlah Perubahan Renja PD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mempertajam proses pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di Tahun 2025 ini.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung serta demi tercapainya Visi ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”***

Soreang, Juli 2025

INSPEKTUR,

Dr. Marlan Nirsyamsu

Pembina Utama Muda

NIP.19660413 199512 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	54
4.1 Rencana Kerja.	54
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	55
BAB V PENUTUP	61
5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	61
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.	61
5.3. Rencana Tindak Lanjut.	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Realisasi Capaian Tahun 2025	7
Tabel 2.2. Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Sampai Dengan Tahun Berjalan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Setelah Perubahan (T-C. 29)	14
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	23
Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	24
Tabel 2.5. Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung	27
Tabel 2.6. Tabel T-C.32. Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	34
Tabel 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah	38
Tabel 3.2. Tujuan Dan Sasaran Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025	40
Tabel 3.3. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Perubahan Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bandung	47
Tabel 4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bandung dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Renja PD merupakan satu proses dari rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja PD adalah bagian yang utuh dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*common goals*) dan respon terhadap dinamisasi perubahan pembangunan yang terjadi selama pelaksanaan anggaran tahun berjalan, SKPD harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) PD. Perubahan Renja Inspektorat Daerah disusun sebagai langkah dalam mengantisipasi dinamisasi tersebut selama proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Perubahan Renja SKPD tersebut adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD Perubahan, dimana penyusunannya dilakukan dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) dengan adanya beberapa

penajaman kegiatan yang akan dilakukan pada pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025 ini.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan

- Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 94);
 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
 20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tanggal 28 Mei 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025;
 21. Surat Edaran Bupati Nomor 000.8./011/3683/BAPPERIDA tanggal 13 tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025.
 22. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Nomor 900/190/Inspektorat tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengawasan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung untuk Mewujudkan visi dan misi Bupati Bandung terpilih dalam masa pelaksanaan APBD Perubahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Merupakan Dokumen Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) tahun pertama;
2. Tersedianya program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung di pada urusan pengawasan dalam satu tahun;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas dan responsibilitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan dan prioritas daerah yang diselaraskan dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama penyelenggaraan kegiatan dalam satu semester.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang hasil evaluasi tahun lalu dan capaian kinerja terhadap Renstra.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung periode sebelumnya.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pada bagian ini memuat penjelasan isu-isu penting yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. Reviu Terhadap Rancangan Awal.

Pada Bagian ini memuat hasil reviu dari rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pada Bagian ini memuat usulan-usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan, dan Sasaran Renja
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

1. Catatan penting.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dimana setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kondisi pencapaian kinerja sampai dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah pencapaian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.1.

Indikator Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi s.d Mei		Capaian	
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
2	3	4	5	6	7	8	9
INSPEKTORAT DAERAH							
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai AKIP	86,00 Poin 79,00 Poin	39,643,297,69 4.00	0.00	13,646,470,73 0.00	0.00%	34.42 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	28 Dokumen	68,000,000.00	5 Dokumen	44,806,500.00	17.86%	65.89 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	44,806,500.00	25.00%	896.13 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	-	25.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000.00	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi s.d Mei		Capaian	
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	-	25.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000.00	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	-	25.00%	0.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	-	25.00%	0.00%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	-	50.00%	0.00%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	23,000,000.00	1 Data	-	25.00%	0.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100.00 Persen	28,560,097,040.00	0.00 Persen	12,406,878,475.00	0.00%	43.44 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	28,517,517,040.00	98 Orang/bulan	12,406,878,475.00	105.38 %	43.51 %
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	14,080,000.00	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	14,250,000.00	0 Laporan	-	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14,250,000.00	0 Laporan	-	0.00%	0.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100.00 Persen	2,210,060,000.00	0.00 Persen	97,075,000.00	0.00%	4.39%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	230,000,000.00	0 Paket	-	0.00%	0.00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang/bulan	1,980,060,000.00	4 Orang/bulan	97,075,000.00	9.09%	4.90%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi s.d Mei		Capaian	
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	2,948,099,400.00	0.00 Persen	386,261,103.00	0.00%	13.10 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	58,149,400.00	0 Paket	24,181,500.00	0.00%	41.59 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,150,000,000.00	0 Paket	190,968,618.00	0.00%	8.88%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	53,720,000.00	1 Paket	77,526,000.00	8.33%	144.31 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	74,507,200.00	1 Paket	20,923,925.00	8.33%	28.08 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	123,682,800.00	2 Paket	2,113,500.00	28.57%	1.71%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	25,000,000.00	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	114,640,000.00	1 Laporan	11,326,350.00	9.09%	9.88%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	348,400,000.00	2 Laporan	59,221,210.00	16.67%	17.00 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100.00 Persen	3,002,565,084.00	0.00 Persen	23,398,700.00	0.00%	0.78%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2,355,165,084.00	0 Paket	-	0.00%	0.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	647,400,000.00	0 Unit	23,398,700.00	0.00%	3.61%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	2,118,876,170.00	0.00 Persen	631,488,037.00	0.00%	29.80 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22,500,000.00	0 Laporan	7,802,000.00	0.00%	34.68 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	421,193,600.00	3 Laporan	228,642,037.00	25.00%	54.28 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000.00	0 Laporan	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,670,182,570.00	2 Laporan	395,044,000.00	16.67%	23.65 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100.00 Persen	735,600,000.00	0.00 Persen	56,562,915.00	0.00%	7.69%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi s.d Mei		Capaian	
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	150,600,000.00	4 Unit	44,612,915.00	16.67%	29.62%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	60,000,000.00	3 Unit	11,500,000.00	150.00%	19.17%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	525,000,000.00	1 Unit	450,000.00	100.00%	0.09%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	100.00 Persen	5,078,555,700.00	0.00 Persen	499,530,772.00	0.00%	9.84%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	100.00 Persen	3,598,018,000.00	0.00 Persen	364,239,772.00	0.00%	10.12%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	78 Laporan	402,270,000.00	0 Laporan	13,565,000.00	0.00%	3.37%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	200,000,000.00	2 Laporan	8,645,000.00	11.11%	4.32%
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	239,708,000.00	15 Laporan	5,930,000.00	17.86%	2.47%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	275,000,000.00	0 Laporan	4,285,000.00	0.00%	1.56%
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100 Laporan	963,500,000.00	40 Laporan	171,187,750.00	40.00%	17.77%
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1,005,000,000.00	0 Kesepakatan	-	0.00%	0.00%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62 Dokumen	512,540,000.00	34 Dokumen	160,627,022.00	54.84%	31.34%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	1,480,537,700.00	0.00 Persen	135,291,000.00	0.00%	9.14%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	30 Laporan	958,337,700.00	4 Laporan	59,365,000.00	13.33%	6.19%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	98 Laporan	522,200,000.00	4 Laporan	75,926,000.00	4.08%	14.54%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penanganan pengawasan	100.00 Persen	6,749,998,715.00	0.00 Persen	1,174,584,330.00	0.00%	17.40%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100.00 Persen	1,852,175,300.00	0.00 Persen	3,956,000.00	0.00%	0.21%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	217,000,000.00	0 Rekomendasi	-	0.00%	0.00%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi s.d Mei		Capaian	
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1,635,175,300.00	0 Rekomendasi	3,956,000.00	0.00%	0.24%
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	94.00 Persen	4,897,823,415.00	0.00 Persen	1,170,628,330.00	0.00%	23.90 %
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62 Perangkat Daerah	221,300,000.00	33 Perangkat Daerah	156,785,330.00	53.23%	70.85 %
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	62 Perangkat Daerah	400,000,000.00	0 Perangkat Daerah	119,515,000.00	0.00%	29.88 %
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	3,710,659,415.00	2 Kegiatan	840,356,750.00	20.00%	22.65 %
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	565,864,000.00	6 Perangkat Daerah	53,971,250.00	60.00%	9.54%

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mengelola total anggaran sebesar Rp51,47 miliar. Hingga bulan Mei, realisasi anggaran mencapai Rp15,32 miliar atau sekitar 29,76% dari total anggaran. Persentase ini terlihat cukup proporsional jika dibandingkan dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan hampir setengah tahun, namun dari sisi kinerja, capaian fisik pada sebagian besar program dan subkegiatan masih menunjukkan ketertinggalan, bahkan pada banyak komponen belum terlihat hasil nyata.

Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* yang mencakup kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hingga penyediaan sarana dan operasional kantor. Meskipun serapan anggaran program ini telah mencapai lebih dari sepertiga dari pagu yang dialokasikan, sebagian besar indikator kinerja masih berada pada level nol persen. Kegiatan perencanaan dan penganggaran seperti penyusunan RKA, DPA, dan laporan kinerja, umumnya baru terealisasi sebagian kecil atau bahkan belum berjalan sama sekali. Bahkan, capaian fisik dari penyusunan dokumen perencanaan dan laporan

evaluasi hampir seluruhnya masih di bawah 25%, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan dan dokumentasi masih berjalan sampai saat ini.

Sementara itu, dalam *Program Penyelenggaraan Pengawasan*, yang menjadi inti dari fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), capaian kinerjanya juga masih rendah. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perkembangan positif, seperti pelaksanaan pengawasan desa yang telah menghasilkan 40 dari 100 laporan yang ditargetkan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sudah mencapai lebih dari separuh dari target dokumen. Di sisi lain, pengawasan kinerja dan keuangan, reviu laporan, serta kerjasama pengawasan internal, belum menampakkan hasil yang signifikan dari sisi kinerja.

Untuk *Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi*, realisasi anggaran mencapai sekitar 17,40% dari total pagu yang mencapai hampir Rp6,75 miliar. Kinerja fisik pada program ini terlihat mulai terbentuk, khususnya pada kegiatan pendampingan perangkat daerah dan kegiatan koordinasi serta monitoring pencegahan korupsi. Sebanyak 33 dari 62 perangkat daerah telah didampingi, mencerminkan lebih dari 50% capaian target sedangkan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan belum memperlihatkan progres berarti, baik secara fisik maupun anggaran.

Beberapa subkegiatan sudah menyerap anggaran dan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan serta penguatan pengawasan internal atas realisasi program. Harmonisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja menjadi aspek yang krusial agar tujuan pengawasan, pembinaan, dan penjaminan akuntabilitas pemerintahan daerah dapat tercapai secara optimal.

TABEL 2.2.
Tabel T-C. 29 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG SETELAH PERUBAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
INSPEKTORAT DAERAH										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	84.70 Poin	84.00 Poin	81.99 Poin	85.80 Poin	105%	82.00 Poin	0.00	169.80	200%
	Nilai IKM	80.00 Poin	80.91 Poin	78.00 Poin	83.32 Poin	107%	79.00 Poin	0.00	164.23	205%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	112 Dokumen	42 Dokumen	24 Dokumen	28 Dokumen	117%	28 Dokumen	0.00	70.00	63%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1.00	13.00	65%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1.00	13.00	65%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0.00	6.00	43%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1.00	7.00	50%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	14 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0.00	6.00	43%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1.00	7.00	50%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1.00	7.00	50%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	1.00	1.00	0%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0%	4 Data	1.00	1.00	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	100 Orang/bulan	99 Orang/bulan	99%	93 Orang/bulan	98.00	290.00	312%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%		0.00	0.00	0%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	0.00	36.00	60%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0.00	4.00	50%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0.00	16.00	40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	0.00	2.00	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang	48 Orang	44 Orang	44 Orang	100%	44 Orang	4.00	96.00	53%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	20 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	0.00	25.00	71%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	16 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	12 Paket	0.00	26.00	62%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	4 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	1.00	17.00	43%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	1.00	37.00	62%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	14 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	2.00	23.00	66%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0.00	8.00	67%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	22 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	1.00	34.00	62%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan	160 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2.00	174.00	89%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	0.00	0.00	0%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	0.00	0.00	0%
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0.00	0.00	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3036 Laporan	3000 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0.00	3012.00	99%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3.00	39.00	65%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	0.00	24.00	40%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2.00	38.00	63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	0.00	4.00	50%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	48 Unit	14 Unit	16 Unit	114%	24 Unit	4.00	68.00	57%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	2 Unit	3.00	30.00	375%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1.00	4.00	80%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	366 Laporan	136 Laporan	74 Laporan	74 Laporan	100%	78 Laporan	0.00	210.00	57%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	176 Laporan	124 Laporan	16 Laporan	26 Laporan	163%	18 Laporan	2.00	152.00	86%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	311 Laporan	78 Laporan	65 Laporan	86 Laporan	132%	84 Laporan	15.00	179.00	58%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 Laporan	18 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	160%	8 Laporan	0.00	26.00	67%
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	450 Laporan	150 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	40.00	290.00	64%
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%	1 Kesepakatan	0.00	2.00	50%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	196 Dokumen	10 Dokumen	62 Dokumen	62 Dokumen	100%	62 Dokumen	34.00	106.00	54%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	150 Laporan	60 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	4.00	94.00	63%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	220 Laporan	16 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	98 Laporan	4.00	31.00	14%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penanganan pengawasan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	100.00 Persen	0.00	200.00	200%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	20 Rekomendasi	8 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%	4 Rekomendasi	0.00	12.00	60%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	20 Rekomendasi	8 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%	4 Rekomendasi	0.00	12.00	60%
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	94.00 Persen	0.00	200.00	200%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	198 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	100%	62 Perangkat Daerah	33.00	107.00	54%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	191 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	100%	62 Perangkat Daerah	0.00	67.00	35%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei Tahun 2025		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Mei Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	34 Kegiatan	4 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	120%	10 Kegiatan	2.00	18.00	53%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	135 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	100%	10 Perangkat Daerah	6.00	33.00	24%

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tabel 2.4 di atas, hampir seluruh kegiatan tercatat telah mencapai 100% target kinerja bahkan melampaui target Renstra secara kumulatif—misalnya capaian Nilai AKIP sebesar 297% dan Nilai IKM sebesar 304% terhadap target awal. Subkegiatan teknis seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengawasan, reviu laporan, hingga pendampingan SPIP rata-rata menunjukkan realisasi 70–100% atau lebih. Ini memberikan gambaran optimistik terhadap kemampuan Inspektorat dalam memenuhi target makro. Berikutnya Inspektorat Daerah akan melakukan kinerja yang belum tercapai sehingga capaian target bisa terpenuhi di akhir periode. Seluruh Pendanaan Kinerja pada Subkegiatan Inspektorat Daerah diakomodir dari APBD Kabupaten Bandung.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah, yaitu:

Kedudukan :

Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tugas :

Membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, merencanakan dan menetapkan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, melaksanakan pembinaan dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, perumusan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- a. penyelenggaraan pengawasan dalam konteks pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/ pemerintahan yang baik (*good governance*);

- a. pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, inspektur pembantu dan jabatan fungsional.
- a. pengelolaan penggunaan anggaran dan penggunaan barang daerah, serta sumber daya aparatur Inspektorat daerah;
- a. penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan; dan
- b. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Inspektorat daerah.

Pencapaian Kinerja Inspektorat daerah pada Tahun 2025 menggunakan dasar Renstra 2021-2026 dan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

N O.	INDIKATOR SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SKM	80	Index RB	77	78	79	83.37	83.37	83.32	-	83.37	Tercapai dan On The Track
2	Nilai BMD	90	Index RB	80	80	80	80	80.91	95.07	-	80	Tercapai dan On The Track
3	Level Kapabilitas APIP	4	Index RB	3	3	3	3	3	3	-	3	Tercapai dan On The Track
4	Persentase Tindak Lanjut atas temuan eksternal/BPK	100	Index RB	72	73	74	75	82.5	82.3	-	82.5	Tercapai dan On The Track
5	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Standar untuk Diusulkan Memperoleh Predikat WBK / WBMM	100	Index RB	100	100	100	100	100	100	-	100	Tercapai dan On The Track

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebelum menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, terlebih dahulu harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.7. yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengawasan dalam konteks pengawasan intern	1. Masih terdapat temuan yang berulang-ulang pada perangkat daerah di setiap tahun 2. Masih kurangnya pemahaman terhadap fungsi Lembaga APIP	1. Konsistensi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah.
			2. Pemahaman perangkat daerah yang kurang terhadap fungsi APIP.
			3. Dokumen/alat bukti pengaduan masyarakat/ lembaga kurang lengkap
			Hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan pemerintahan dan urusan pemerintahan belum sepenuhnya dijadikan sebagai perbaikan pelaksanaan
			Hasil penyelenggaraan pengawasan dalam konteks pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain belum dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan
			Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.
			Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja
			Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian
			Tenaga Fungsional PPUPD dan Auditor masih terbatas
			Belum meratanya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan untuk pencapaian tujuan, baik berupa permasalahan/hambatan, tantangan maupun peluang. Perumusan isu strategis dilakukan agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan pencapaian tujuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, isu strategis yang berkembang di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yaitu:

1. Pengelolaan Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara elektronik melalui aplikasi SIMWAS dan SIMASLAHAT;
2. Pemenuhan MCP KPK-RI (8 Area Intervensi, yaitu: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa);
3. UPG (tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi);
4. Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3;
5. Pergeseran Paradigma Pengawasan APIP (mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai *Consultant Partner*);
6. Penerapan SPIP Perangkat Daerah;
7. Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
8. Peningkatan Kompetensi SDM APIP.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah tidak terlepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Bandung, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPDP dimaksud.

Analisa kebutuhan anggaran yang berdasarkan isu dan RKPD-P pada Inspektorat Daerah adalah dengan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan wajib mengikat yakni penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimana terdapat penyesuaian sebagai berikut

1. Gaji dan Tunjangan (Sebelum Perubahan) Rp. 28.037.727.115

2. Penambahan Gaji dan Tunjangan

Rp. 7 110 762 780 +

Anggaran Gaji dan Tunjangan

Rp. 35.148.489.895

Penambahan pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 7.110.762.782 berupa Penambahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rincian :

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 2.868.438.310
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 2.501.340.604
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 1.522.831.466
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 218.152.400

Penambahan belanja gaji dan tunjangan tersebut untuk memenuhi kekurangan penganggaran atas Tambahan Penghasilan PNS ke 13 dan ke 14.

Matriks analisa kebutuhan dan distribusi anggaran pada Renja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2.5.
Tabel T-C. 31 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN BANDUNG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					63,540,266,364.28	59,021,009,004.00				63,540,266,364.28	59,021,009,004.00	-4,519,257,360.28
06.01	INSPEKTORAT DAERAH					63,540,266,364.28	59,021,009,004.00				63,540,266,364.28	59,021,009,004.00	-4,519,257,360.28
6:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nilai IKM Nilai AKIP	80 % 86 Point	80 % 86 Point	51,441,562,549.28	51,164,649,001.00	Nilai IKM Nilai AKIP	80 % 86 Point	80 % 86 Point	51,441,562,549.28	51,164,649,001.00	-276,913,548.28
6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	28 Dokumen	100.00 Persen	278,000,000.00	312,989,096.00	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	28 Dokumen	100 Dokumen	278,000,000.00	312,989,096.00	34,989,096.00
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	105,000,000.00	93,911,450.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	105,000,000.00	93,911,450.00	-11,088,550.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	13,725,296.00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	13,725,296.00	-1,274,704.00
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25,000,000.00	22,835,300.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25,000,000.00	22,835,300.00	-2,164,700.00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	55,000,000.00	113,817,050.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	55,000,000.00	113,817,050.00	58,817,050.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	14,150,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	14,150,000.00	4,150,000.00
6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	45 Data	23,000,000.00	9,550,000.00	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	45 Data	23,000,000.00	9,550,000.00	-13,450,000.00
6.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	31,628,511,295.28	34,252,083,051.00	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	31,628,511,295.28	34,252,083,051.00	2,623,571,755.72
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	109 Orang/bulan	31,585,931,295.28	34,219,823,051.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	109 Orang/bulan	31,585,931,295.28	34,219,823,051.00	2,633,891,755.72

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	14,080,000.00	10,640,000.00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	14,080,000.00	10,640,000.00	-3,440,000.00
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	-3,440,000.00
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	-3,440,000.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100.00 Persen	100.00 Persen	3,360,060,000.00	3,052,943,350.00	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100.00 Persen	100.00 Persen	3,360,060,000.00	3,052,943,350.00	-307,116,650.00
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	9 Paket	630,000,000.00	630,000,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	9 Paket	630,000,000.00	630,000,000.00	0.00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	102 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2,730,060,000.00	2,422,943,350.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	102 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2,730,060,000.00	2,422,943,350.00	-307,116,650.00
6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	100.00 Persen	3,350,953,903.00	2,849,372,253.00	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	100.00 Persen	3,350,953,903.00	2,849,372,253.00	-501,581,650.00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10 Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10 Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	8 Paket	1,150,763,203.00	839,593,203.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	8 Paket	1,150,763,203.00	839,593,203.00	-311,170,000.00
6.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25 Paket	553,720,000.00	553,720,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25 Paket	553,720,000.00	553,720,000.00	0.00
6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	74,507,200.00	74,507,200.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	74,507,200.00	74,507,200.00	0.00
6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15 Paket	423,682,800.00	429,217,800.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15 Paket	423,682,800.00	429,217,800.00	5,535,000.00
6.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	122 Dokumen	1000 Dokumen	25,000,000.00	136,170,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	122 Dokumen	1000 Dokumen	25,000,000.00	136,170,000.00	111,170,000.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	164,880,700.00	164,880,700.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	164,880,700.00	164,880,700.00	0.00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	758,400,000.00	451,283,350.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	758,400,000.00	451,283,350.00	-307,116,650.00
6.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	80.00 Persen	80.00 Persen	6,851,562,884.00	5,297,913,094.00	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	80.00 Persen	80.00 Persen	6,851,562,884.00	5,297,913,094.00	-1,553,649,790.00
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	213 Paket	120 Paket	3,355,165,084.00	2,975,368,184.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	213 Paket	120 Paket	3,355,165,084.00	2,975,368,184.00	-379,796,900.00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	120 Unit	3,496,397,800.00	2,322,544,910.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	120 Unit	3,496,397,800.00	2,322,544,910.00	-1,173,852,890.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	100.00 Persen	4,811,874,467.00	3,903,037,157.00	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	100.00 Persen	4,811,874,467.00	3,903,037,157.00	-908,837,310.00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22,500,000.00	22,500,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,239,191,897.00	1,239,191,897.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,239,191,897.00	1,239,191,897.00	0.00
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	180,000,000.00	180,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,370,182,570.00	2,461,345,260.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,370,182,570.00	2,461,345,260.00	-908,837,310.00
6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100.00 Persen	100.00 Persen	1,160,600,000.00	1,496,311,000.00	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100.00 Persen	100.00 Persen	1,160,600,000.00	1,496,311,000.00	335,711,000.00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	150,600,000.00	150,600,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	150,600,000.00	150,600,000.00	0.00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	190 Unit	260,000,000.00	260,000,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	190 Unit	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	750,000,000.00	1,085,711,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	750,000,000.00	1,085,711,000.00	335,711,000.00
6.01.02..	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	100.00 Persen	100.00 Persen	5,723,705,100.00	3,259,026,780.00	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	100.00 Persen	100.00 Persen	5,723,705,100.00	3,259,026,780.00	-2,464,678,320.00
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	70.00 Persen	70.00 Persen	4,193,167,400.00	2,195,313,900.00	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	70.00 Persen	70.00 Persen	4,193,167,400.00	2,195,313,900.00	-1,997,853,500.00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan	16 Laporan	452,270,000.00	194,950,800.00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan	16 Laporan	452,270,000.00	194,950,800.00	-257,319,200.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	350,000,000.00	205,750,900.00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	350,000,000.00	205,750,900.00	-144,249,100.00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	112 Laporan	143 Laporan	639,708,000.00	318,816,400.00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	112 Laporan	143 Laporan	639,708,000.00	318,816,400.00	-320,891,600.00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan	10 Laporan	275,000,000.00	64,530,800.00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan	10 Laporan	275,000,000.00	64,530,800.00	-210,469,200.00
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	116 Laporan	182 Laporan	1,163,500,000.00	557,691,500.00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	116 Laporan	182 Laporan	1,163,500,000.00	557,691,500.00	-605,808,500.00
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	750,149,400.00	313,213,500.00	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	750,149,400.00	313,213,500.00	-436,935,900.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62 Dokumen	62 Dokumen	562,540,000.00	540,360,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62 Dokumen	62 Dokumen	562,540,000.00	540,360,000.00	-22,180,000.00
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	100.00 Persen	1,530,537,700.00	1,063,712,880.00	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	100.00 Persen	1,530,537,700.00	1,063,712,880.00	-466,824,820.00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	32 Laporan	32 Laporan	522,200,000.00	236,590,800.00	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	32 Laporan	32 Laporan	522,200,000.00	236,590,800.00	-285,609,200.00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	206 Laporan	1,008,337,700.00	827,122,080.00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	206 Laporan	1,008,337,700.00	827,122,080.00	-181,215,620.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.03..	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase cakupan penanganan pengawasan	100.00 Persen	100.00 Persen	6,374,998,715.00	4,597,333,223.00	Persentase cakupan penanganan pengawasan	100.00 Persen	100.00 Persen	6,374,998,715.00	4,597,333,223.00	-1,777,665,492.00
6.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100.00 Persen	100.00 Persen	2,002,175,300.00	1,016,570,100.00	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100.00 Persen	100.00 Persen	2,002,175,300.00	1,016,570,100.00	-985,605,200.00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	367,000,000.00	236,889,300.00	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	367,000,000.00	236,889,300.00	-130,110,700.00
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,635,175,300.00	779,680,800.00	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,635,175,300.00	779,680,800.00	-855,494,500.00
6.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	94.00 Persen	94.00 Persen	4,372,823,415.00	3,580,763,123.00	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	94.00 Persen	94.00 Persen	4,372,823,415.00	3,580,763,123.00	-792,060,292.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambah an / Pergesera n
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	642,529,600.00	655,632,600.00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	642,529,600.00	655,632,600.00	13,103,000.00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	425,000,000.00	250,879,423.00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	425,000,000.00	250,879,423.00	-174,120,577.00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan	12 Kegiatan	2,789,429,815.00	2,448,266,700.00	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan	12 Kegiatan	2,789,429,815.00	2,448,266,700.00	-341,163,115.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD-P 2024	
				Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	515,864,000.00	225,984,400.00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	515,864,000.00	225,984,400.00	-289,879,600.00
Jumlah Total						63,540,266,364.28	59,021,009,004.00						

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memuat 3 Program, 10 Kegiatan dan 42 sub kegiatan, sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan pada Perubahan Anggaran tahun 2025 menjadi 3 Program, 11 Kegiatan dan 44 sub kegiatan,terdapat 2 sub kegiatan baru yaitu Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya serta Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipandang perlu pada Renja Perubahan ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat selama ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat, Namun demikian isu-isu yang strategis maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.6.

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	
1	2	3	4	5	6
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nilai SAKIP	86.20 Poin	51,164,649,001.00
			Nilai IKM	83.00 Poin	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 Dokumen	312,989,096.00
6.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	93,911,450.00
6.01.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	15,000,000.00
6.01.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	15,000,000.00
6.01.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	15,000,000.00
6.01.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	13,725,296.00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	22,835,300.00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	113,817,050.00
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	14,150,000.00
6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	45 Data	9,550,000.00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100.00 Persen	34,252,083,051.00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/bulan	34,219,823,051.00
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10,640,000.00
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10,810,000.00
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10,810,000.00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100.00 Persen	3,052,943,350.00
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	630,000,000.00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	2,422,943,350.00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	2,849,372,253.00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200,000,000.00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	839,593,203.00
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	553,720,000.00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	74,507,200.00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	429,217,800.00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	136,170,000.00
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	164,880,700.00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	451,283,350.00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	80.00 Persen	5,297,913,094.00
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit	2,975,368,184.00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	2,322,544,910.00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Operasional Perkantoran	100.00 Persen	3,903,037,157.00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22,500,000.00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,239,191,897.00
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180,000,000.00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,461,345,260.00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100.00 Persen	1,496,311,000.00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	150,600,000.00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	260,000,000.00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1,085,711,000.00
6:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	100.00 Persen	3,259,026,780.00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	70.00 Persen	2,195,313,900.00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	194,950,800.00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	205,750,900.00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	143 Laporan	318,816,400.00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan	64,530,800.00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	182 Laporan	557,691,500.00
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	313,213,500.00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62 Dokumen	540,360,000.00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	1,063,712,880.00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	32 Laporan	236,590,800.00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	206 Laporan	827,122,080.00
6:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase cakupan penanganan pengawasan	100.00 Persen	4,597,333,223.00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100.00 Persen	1,016,570,100.00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	236,889,300.00
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	779,680,800.00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	94.00 Persen	3,580,763,123.00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62 Perangkat Daerah	655,632,600.00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	62 Perangkat Daerah	250,879,423.00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	2,448,266,700.00
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 Perangkat Daerah	225,984,400.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Daerah Tahun 2024 yang memuat kebijakan dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Reviu Laporan Keuangan
 - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021–2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Bandung adalah :

“Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”.

Sejalan dengan VISI di atas, terdapat 5 (lima) Misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya;
2. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang Wilayah;
4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.**

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan penting dalam menunjang terwujudnya visi tersebut yaitu ***“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “*** dan pada misi ke 5 (lima) yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”.***

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 , ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.

A. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel.

B. Sasaran

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Meningkatnya Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi.

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		Persentase Capaian Nilai Maturitas SPIP	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Nilai Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
			Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal/ BPK	70	72	73	74	75
		Meningkatnya Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi	Persentase Unit Kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi		Nilai AKIP	81,8 Poin	81,9 Poin	81,99 Poin	82 Poin	82 Poin
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai SKM	76 Poin	77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin
			Persentase Asset Dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%	80%

A. Indikator Tujuan, Sasaran, serta Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sedangkan sasaran terhadap indikator-indikator inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tercapainya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai IKM Nilai BMD			
1	Menyelenggarakan kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku		
a	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
b	Menyediakan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
c	Menyediakan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
d	Menyediakan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
e	Menyediakan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
f	Menyediakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
g	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	Menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan PD	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
a	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
b	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
c	Menyediakan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
d	Menyediakan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	
3	Meningkatnya Kinerja ASN PD	Tercapainya Kinerja ASN PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%		
a	Menyediakan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
b	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
4	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Operasional Perkantoran		
a	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
b	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
c	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
d	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
e	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
f	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
g	Melaksanakan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
h	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Operasional Perkantoran		
a	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
b	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
c	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
6	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Operasional Perkantoran		
a	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
b	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
c	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
d	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			yang Dipelihara/Direhabilitasi	
II	Tercapainya Profesionalisme Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan			
1	Tercapainya penyelenggaraan pengawasan internal berdasarkan PKPT/Non PKPT	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal berdasarkan PKPT/Non PKPT	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT/Nom PKPT		
a	Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
b	Melaksanakan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
c	Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	
d	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	
e	Melaksanakan Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Pengawasan Desa			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	
f	Melaksanakan Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerjasama pengawasan Internal			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	
g	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
2	Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu		
a	Menangani Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b	Melaksanakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
III	Tercapainya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penanganan pengawasan			
1	Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
a	Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	
b	Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	
2	Tercapainya Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Pendampingan dan Asistensi terlaksana		
a	Melaksanakan Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
b	Melaksanakan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
c	Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
d	Melaksanakan Pendampingan, Asistensi dan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Verifikasi Penegakan Integritas					dan Verifikasi Penegakan Integritas	

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memuat 3 Program, 11 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan di lingkup kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.3

Tabel T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					51,471,852,109.00	59,021,009,004.00					27,918,945,326.00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					51,471,852,109.00	59,021,009,004.00					27,918,945,326.00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.00 Poin	86.20 Poin	39,643,297,694.00	51,164,649,001.00				82.00 Poin	22,900,833,422.00	
		Nilai IKM		79.00 Poin	83.00 Poin						80.00 Poin		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	100 Dokumen	68,000,000.00	312,989,096.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		28 Dokumen	35,000,000.00	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	93,911,450.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		4 Dokumen	5,000,000.00	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		4 Dokumen	5,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		4 Dokumen	5,000,000.00	
6.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		4 Dokumen	5,000,000.00	
6.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	13,725,296.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		4 Dokumen	5,000,000.00	
6.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000.00	22,835,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		4 Laporan	5,000,000.00	
6.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000.00	113,817,050.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		4 Laporan	5,000,000.00	
6.01.01.2.0 1.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	14,150,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Data	45 Data	23,000,000.00	9,550,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja				
6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	28,560,097,040.00	34,252,083,051.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM				100.00 Persen	20,951,686,022.00
6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 Orang/bulan	109 Orang/bulan	28,517,517,040.00	34,219,823,051.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH			93 Orang/bulan	20,933,606,022.00
6.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	14,080,000.00	10,640,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja			12 Dokumen	4,080,000.00
6.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja			2 Laporan	4,250,000.00
6.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja			12 Laporan	9,750,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
			Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	2,210,060,000.00	3,052,943,350.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	480,060,000.00	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9 Paket	230,000,000.00	630,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		1 Paket	50,000,000.00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	300 Orang	1,980,060,000.00	2,422,943,350.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		44 Orang	430,060,000.00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	2,948,099,400.00	2,849,372,253.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	408,099,400.00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	10 Paket	58,149,400.00	200,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		5 Paket	8,149,400.00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	8 Paket	2,150,000,000.00	839,593,203.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		12 Paket	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
			Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	25 Paket	53,720,000.00	553,720,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		12 Paket	3,720,000.00	
6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	20 Paket	74,507,200.00	74,507,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		12 Paket	110,000,000.00	
6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	15 Paket	123,682,800.00	429,217,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		7 Paket	58,190,000.00	
6.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1000 Dokumen	25,000,000.00	136,170,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		2 Dokumen	23,400,000.00	
6.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	12 Laporan	114,640,000.00	164,880,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		11 Laporan	84,640,000.00	
6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20 Laporan	348,400,000.00	451,283,350.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		12 Laporan	120,000,000.00	
6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	80.00 Persen	3,002,565,084.00	5,297,913,094.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		100.00 Persen	100,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	120 Unit	2,355,165,084.00	2,975,368,184.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		1 Unit	50,000,000.00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	120 Unit	647,400,000.00	2,322,544,910.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		1 Unit	50,000,000.00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	2,118,876,170.00	3,903,037,157.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	720,488,000.00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	22,500,000.00	22,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		12 Laporan	7,500,000.00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	421,193,600.00	1,239,191,897.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		12 Laporan	105,693,600.00	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000.00	180,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		12 Laporan	50,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	1,670,182,570.00	2,461,345,260.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Laporan	557,294,400.00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	735,600,000.00	1,496,311,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		100.00 Persen	205,500,000.00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	24 Unit	150,600,000.00	150,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		24 Unit	130,600,000.00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	190 Unit	60,000,000.00	260,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghemata n Belanja		2 Unit	20,000,000.00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3 Unit	525,000,000.00	1,085,711,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghemata n Belanja		1 Unit	31,900,000.00
6:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	5,078,555,700.00	3,259,026,780.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	2,211,804,415.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	70.00 Persen	3,598,018,000.00	2,195,313,900.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	1,215,319,415.00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Laporan	16 Laporan	402,270,000.00	194,950,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		78 Laporan	210,100,000.00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	20 Laporan	200,000,000.00	205,750,900.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		18 Laporan	120,000,000.00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Laporan	143 Laporan	239,708,000.00	318,816,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		84 Laporan	115,000,000.00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	10 Laporan	275,000,000.00	64,530,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		8 Laporan	85,000,000.00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	182 Laporan	963,500,000.00	557,691,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		100 Laporan	409,760,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.02.2.0 1.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1,005,000,000.00	313,213,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		1 Kesepakatan	75,459,415.00	
6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Dokumen	62 Dokumen	512,540,000.00	540,360,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		62 Dokumen	200,000,000.00	
6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	1,480,537,700.00	1,063,712,880.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	996,485,000.00	
6.01.02.2.0 2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	32 Laporan	958,337,700.00	236,590,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		30 Laporan	357,200,000.00	
6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Laporan	206 Laporan	522,200,000.00	827,122,080.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		98 Laporan	639,285,000.00	
6:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penanganan pengawasan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	6,749,998,715.00	4,597,333,223.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	2,806,307,489.00	
6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	100.00 Persen	100.00 Persen	1,852,175,300.00	1,016,570,100.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	400,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
			Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan		Sesudah perubahan		
			Semua Kel/Desa										
6.01.03.2.0 1.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	217,000,000.00	236,889,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		4 Rekomendasi	150,000,000.00	
6.01.03.2.0 1.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,635,175,300.00	779,680,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM Penghemata n Belanja		4 Rekomendasi	250,000,000.00	
6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.00 Persen	94.00 Persen	4,897,823,415.00	3,580,763,123.0 0	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM			100.00 Persen	2,406,307,489.0 0	
6.01.03.2.0 2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	221,300,000.00	655,632,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		62 Perangkat Daerah	273,500,000.00	
6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	400,000,000.00	250,879,423.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		62 Perangkat Daerah	250,000,000.00	
6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kegiatan	12 Kegiatan	3,710,659,415.00	2,448,266,700.0 0	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghemata n Belanja		10 Kegiatan	1,609,307,489.0 0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	565,864,000.00	225,984,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja			10 Perangkat Daerah	273,500,000.00
Jumlah Total						51,471,852,109.00	59,021,009,004.00						27,918,945,326.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja.

Memperhatikan Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Nomor 700/KEP.1036-INSPEKTORAT/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, maka pada Rencana Kerja Perubahan ini berfokus pada penajaman kegiatan berdasarkan tugas-tugas pada landasan aturan tersebut. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Reviu Laporan Keuangan

- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
- e. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
- f. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk menunjang Rencana Kerja tersebut perlu didukung dengan Kegiatan dan pendanaan yang memadai agar tercapainya seluruh Program dan Kegiatan, yang mana pendanaan tersebut dapat kami uraikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025							Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					51,471,852,109.00	59,021,009,004.00			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					51,471,852,109.00	59,021,009,004.00			
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.00 Poin	86.20 Poin	39,643,297,694.00	51,164,649,001.00			
		Nilai IKM		79.00 Poin	83.00 Poin					
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	100 Dokumen	68,000,000.00	312,989,096.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	93,911,450.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025							Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
6.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000.00	13,725,296.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000.00	22,835,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000.00	113,817,050.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	14,150,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025							Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
6.01.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Data	45 Data	23,000,000.00	9,550,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	28,560,097,040.00	34,252,083,051.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 Orang/bulan	109 Orang/bulan	28,517,517,040.00	34,219,823,051.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	
6.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	14,080,000.00	10,640,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	14,250,000.00	10,810,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana			
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	2,210,060,000.00	3,052,943,350.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.01.2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9 Paket	230,000,000.00	630,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6.01.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	300 Orang	1,980,060,000.00	2,422,943,350.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	2,948,099,400.00	2,849,372,253.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	10 Paket	58,149,400.00	200,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	12 Paket	8 Paket	2,150,000,000.00	839,593,203.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Penghematan Belanja		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025							Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		
			Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
			Semua Kel/Desa					ALOKASI UMUM		
6.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	25 Paket	53,720,000.00	553,720,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	20 Paket	74,507,200.00	74,507,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	15 Paket	123,682,800.00	429,217,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1000 Dokumen	25,000,000.00	136,170,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	12 Laporan	114,640,000.00	164,880,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20 Laporan	348,400,000.00	451,283,350.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025							Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	80.00 Persen	3,002,565,084.00	5,297,913,094.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	120 Unit	2,355,165,084.00	2,975,368,184.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja	
6.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	120 Unit	647,400,000.00	2,322,544,910.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	2,118,876,170.00	3,903,037,157.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
6.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	22,500,000.00	22,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana			
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
6.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	421,193,600.00	1,239,191,897.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000.00	180,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	1,670,182,570.00	2,461,345,260.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	735,600,000.00	1,496,311,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		
6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	24 Unit	150,600,000.00	150,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana			
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
6.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	190 Unit	60,000,000.00	260,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3 Unit	525,000,000.00	1,085,711,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	5,078,555,700.00	3,259,026,780.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	70.00 Persen	3,598,018,000.00	2,195,313,900.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Laporan	16 Laporan	402,270,000.00	194,950,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		
6.01.02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	18 Laporan	20 Laporan	200,000,000.00	205,750,900.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025							Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
			Semua Kel/Desa							
6.01.02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Laporan	143 Laporan	239,708,000.00	318,816,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja	
6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	10 Laporan	275,000,000.00	64,530,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.02.2.01.005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	182 Laporan	963,500,000.00	557,691,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	
6.01.02.2.01.006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1,005,000,000.00	313,213,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja	
6.01.02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Dokumen	62 Dokumen	512,540,000.00	540,360,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana			
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	1,480,537,700.00	1,063,712,880.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.02.2.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	32 Laporan	958,337,700.00	236,590,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		
6.01.02.2.02.002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Laporan	206 Laporan	522,200,000.00	827,122,080.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		
6:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penanganan pengawasan	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	6,749,998,715.00	4,597,333,223.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	1,852,175,300.00	1,016,570,100.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.03.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	217,000,000.00	236,889,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan 2025								Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana			
		Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan		
6.01.03.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,635,175,300.00	779,680,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Penghematan Belanja		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.00 Persen	94.00 Persen	4,897,823,415.00	3,580,763,123.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	221,300,000.00	655,632,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	400,000,000.00	250,879,423.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kegiatan	12 Kegiatan	3,710,659,415.00	2,448,266,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		
6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	565,864,000.00	225,984,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penghematan Belanja		

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan rencana perubahan tahunan yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan anggaran pada Semester I Tahun 2025. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan 2025 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 hingga bulan Mei, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian utama. Pertama, realisasi anggaran secara kumulatif memang menunjukkan proporsi yang cukup wajar (sekitar 29,76%) dibanding waktu berjalan, namun capaian kinerja fisik pada sebagian besar subkegiatan masih rendah, bahkan belum terealisasi secara substansial.

Kegiatan strategis yang mendukung pengawasan, pembinaan, dan penjaminan mutu akuntabilitas perangkat daerah seperti reviu, asistensi, pemantauan tindak lanjut, dan perumusan kebijakan pengawasan masih menunjukkan performa dan realisasi tahun berjalan belum mencerminkan kesinambungan tersebut. Oleh karena itu, perlu diwaspadai potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang dapat berdampak pada rendahnya serapan dan pencapaian kinerja di akhir tahun.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2025 secara umum tidak merubah komposisi kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Nomor 700/KEP.1036-INSPEKTORAT/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025. Sehingga pelaksanaan Tugas dan pokok serta fungsi Inspektorat Daerah pada Renja perubahan 2025 tidak berubah

secara signifikan. Kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, dan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi pengawasan dan percepatan pelaporan kinerja.

5.3. Rencana Tindak Lanjut.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah. Sebagai upaya perbaikan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis dan belum terealisasi, terutama kegiatan reviu laporan keuangan, pemantauan TLHP, dan audit khusus sesuai permintaan. Selain itu, alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

INSPEKTUR,

ttd

MARLAN NIRSYAMSU

BUPATI BANDUNG,

TTD

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA